



PEKANBARU 'BANJIR' SAMPAH

● Armada tak Bisa Masuk
TPA Muara Fajar ● Dewan Minta
DLHK Pekanbaru Tegas

PEKANBARU, TRIBUN - Pemandangan sampah menumpuk terlihat di sejumlah jalan di Kota Pekanbaru hingga kemarin, Rabu (3/1). Tumpukan sampah itu, bahkan, sudah memakan badan jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Di simpang Jalan

Teratai-Cempaka, misalnya, tumpukan sampah membuat arus lalu lintas terganggu, karena tidak bisa dilewati dua arah.

Boyke, seorang pengendara motor yang kerap melintas

● ke halaman 7

Pekanbaru 'Banjir'

Sambungan Hal 3

di sana mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sekitar seminggu terakhir. "Di TPS ini sampahnya memang cepat penuh, mungkin karena dekat pasar, kalau tiga hari saja tak diangkut sampahnya sudah menggunung, apalagi kalau lebih dari seminggu, pasti lebih parah lagi," ungkapnya.

Pantauan Tribun, sebagian ruas Jalan Teratai mengalami penyempitan karena tumpukan sampah, bahkan jalan itu hanya cukup untuk dilewati satu mobil. Sejumlah petugas terlihat sudah mulai berangsur-angsur mengangkut sampah ke atas bak truk, namun meski bak truk sudah penuh, tumpukan sampah di TPS tersebut masih tinggi.

Kondisi serupa juga terlihat di sekitar Jalan HR Soebrantas, Jalan Imam Munnandar, Jalan Kapau Sari, Jalan Kandis dan lainnya. Rahmad, warga Pekanbaru mengaku terganggu dengan aroma tidak sedap dari tumpukan sampah, ia menyebut biasanya sampah di TPS sekitar Jalan HR Soebrantas sudah diangkut setiap pagi. "Kalau saya pergi kerja biasanya sudah diangkat, ini malah menumpuk sampahnya," katanya kepada Tribun.

Pemandangan serupa juga terlihat di sekitar Kapau Sari. Satu pengendara, Dodi mengaku heran sampah tidak terangkut di TPS kawasan itu selama beberapa hari. "Ini kapan mau diangkat, kan biasanya diangkut. Ini kok dibiarkan menumpuk," akunya.

Kondisi ini menjadi catatan bagi pengelolaan sampah di Pekanbaru, walaupun sudah ada operator angkutan sam-

pah yang baru yaitu PT Bina Riau Sejahtera (BRS). Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Mulhishun menyoroti kinerja pengelolaan sampah di awal tahun 2024. Ia mengaku ada keributan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. "Iu di TPA lagi ribut-ribut, berdasar laporan dari Plt kadis, ada masalah di TPA. Muncul gejala di sana, tolong tuntaskan," tegasnya.

Menurutnya, gejala di TPA Muara Fajar muncul karena sejumlah pekerja enggan dipindah tugas dari TPA. "Ini jelas mengganggu pengangkutan sampah, itu pekerja mestinya siap diroling dong. Kita cari solusi agar tidak ada masalah lagi di sana," paparnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuht tidak menampik hal itu akibat para pekerja yang menggelar aksi blokir akses ke TPA. "Kita masih di TPA, kita sedang melakukan komunikasi," terangnya kepada Tribun.

Ingot mengatakan, seluruh tumpukan sampah segera diangkut oleh operator mulai kemarin sore. Dirinya menyampaikan bahwa tidak ada lagi permasalahan di TPA Muara Fajar. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pekerja yang ada dalam area TPA. "Jadi aktivitas di TPA sudah lancar kembali, sampah yang tertimbun di TPS segera diangkut armada angkutan operator ke TPA," terangnya.

Ingot menyebut pada prinsipnya para pekerja sudah menerima penjelasan dari DLHK Kota Pekanbaru. Mereka bersedia menghentikan aksi blokir terhadap armada

angkutan sampah ke TPA Muara Fajar. "Untuk kedua TPA kita, Muara Fajar I dan Muara Fajar II sudah beroperasi kembali," paparnya.

Pihaknya mendorong pihak operator maupun angkutan swadaya DLHK Kota Pekanbaru bisa mengangkut seluruh sampah yang tertimbun di TPS. Ia berharap pengangkutan bisa optimal agar permasalahan tumpukan sampah bisa selesai. Armada operator angkutan sampah sudah siap. Ia menyadari bahwa pembongkaran di TPA beberapa hari ini terkendala teknis. "Maka seluruh armada operator angkutan bisa mengangkut sampah ke TPA dari TPS," ulasnya.

Minta Tegas

Menanggapi kondisi ini, Komisi IV DPRD selaku mitra kerja DLHK, sudah jauh hari mengingatkan soal masa transisi ini, jangan sampai jadi alasan sehingga sampah tak terangkut. "Beberapa hari ini terbukti. Ini start buruk pihak ketiga. Kita sudah wanti-wanti dari awal diswakelola kan saja. Tapi Pemko tetap bersikukuh pihak ketiga. Ya, begini jadinya," tegas anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar.

Karena tidak ada pilihan lagi, lanjut Robin, mau tidak mau DLHK Pekanbaru harus tegas kepada PT BRS. Karena tidak ada alasan masa transisi ini, perusahaan untuk mempelajari medan dan lokasi, plus kondisi geografi Kota Pekanbaru. Karena DLHK sendiri yang menyampaikan saat hearing, PT BRS merupakan perusahaan lokal, yang diyakini mampu menangani sampah. **(teo/fer/saf)**